

Catatan:
Dimuat di *Sinar Harapan*,
16 & 17 Juli 2013

Alexei de Tocqueville di Beijing

Oleh: A. Dahana

Sejak pergantian kepemimpinan di China menjelang penghujung tahun 2012 ada sebuah fenomena menarik di negeri itu. Itulah pertanyaan kalau situasi politik dan kemasyarakatan di China dewasa ini sama dengan keadaan di Perancis menjelang revolusi yang meruntuhkan kekuasaan dinasti Bourbon pada 1789. Revolusi Perancis yang prosesnya berlangsung selama 10 tahun dan cukup menggegerkan dunia Barat seolah hidup kembali. Tapi, benarkah situasi sebelum revolusi terjadi di Perancis ada kemiripannya dengan situasi China sekarang?

Penduduk kedua negara itu tentu saja lain, tradisi politik dan masyarakat pasti juga berbeda. Di samping itu lokasinya saling berjauhan dan waktu terjadinya terpisah selama lebih dari 200 tahun. Namun, para pemimpin China percaya ada kesejajaran antara keadaan negeri mereka pasca reformasi dengan situasi di Perancis menjelang revolusi. Oleh karena itulah buku karya Alexis de Tocqueville tiba-tiba saja menjadi *best seller* di negeri semilyar manusia yang secara tradisional memang gemar membaca itu.

De Tocqueville hidup pada 1805-1859. Ia seorang penulis dan pemikir politik Perancis yang berbicara tentang perkembangan masyarakat pada zamannya. Ada dua karya utamanya yang sering dianggap selalu relevan dengan situasi sosial politik pada masa kini. Kedua buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Itulah *Democracy in America* dan *The Ancien Regime and the French Revolution*. Di Amerika buku yang disebut pertama malah jadi salah satu bacaan wajib bagi siswa-siswa SMA.

Argumentasi dasar yang ditonjolkannya dalam *Democracy in America* antara lain mengatakan bahwa alasan utama terjadinya revolusi di negeri itu adalah: rakyat Amerika menginginkan kebebasan dari cengkeraman monarki Inggris. Benih-benih revolusi Amerika antara lain dimulai ketika rakyat Amerika berkeberatan untuk membayar pajak tanpa terwakili di parlemen Inggris. Tuntutan itu tercermin dalam slogan *No taxation without representation*.

Jadi, menurut Tocqueville, keinginan untuk mempraktekkan sistem demokrasi sudah ada sejak revolusi Amerika mulai membara. walaupun pada perkembangannya kemudian terjadi berbagai penyimpangan. Misalnya hak-hak penuh persamaan politik di muka undang-undang dan hukum dari kaum non-kulit putih baru dapat dicapai setelah pertengahan abad ke-20. Dan itupun dilalui dengan perjuangan yang hingar-bingar. Kesimpulannya, Tocqueville membedakan penyebab revolusi Amerika dengan revolusi Perancis: orang Amerika menginginkan kebebasan dan demokrasi, sedangkan orang Perancis membenci golongan yang mendapat hak-hak istimewa atau kaum bangsawan.

Akan halnya penyebab revolusi di Perancis, dalam *The Old Regime and the Revolution* ia kurang setuju dengan pendapat bahwa itu terjadi lantaran adanya penguasa absolut yang melakukan penindasan kejam terhadap rakyat. Revolusi justru terjadi, menurut dia, ketika dinasti Bourbon, sedang bebenah diri. Ekonomi sedang menanjak walaupun diakui kemiskinan memang ada. Perubahan yang diwarnai kekerasan terjadi ketika penguasa feodal tengah berkonsolidasi antara lain dengan menghapuskan hak-hak bangsawan yang sebelumnya menjadi perantara antara kaum tani dengan istana. Itulah barangkali istilah yang populer dewasa ini di bawah sebutan “sentralisasi”. Pada saat yang sama muncullah kaum borjuis sebagai pesaing kaum bangsawan yang sudah tak punya gigi lagi itu. Dan di tengah pencarian rakyat untuk adanya perantara dengan kelas penguasa, pecahlah revolusi. Kelas borjuis juga turut berperan dalam peruntuhan kelas penguasa.

Para ilmuwan politik di Barat menyebut gejala itu sebagai akibat dari “paradoks Tocqueville”, masa ketika tanda-tanda krisis sudah muncul. Atas dasar itu pula, menurut tesis yang diajukan Toqueville, masa paling berbahaya yang dihadapi sebuah rezim penguasa bukanlah ketika terjadi penindasan hebat terhadap rakyat. Ia sebaliknya berkesimpulan revolusi justru pecah pada saat perbaikan pemerintahan sedang berjalan dan pada waktu kehidupan makin bertambah baik. Atau, penumbangan kekuasaan terjadi ketika harapan orang banyak terhadap suatu usaha perbaikan sedang berjalan dan tak sukses. Itulah yang disebut sebagai “paradoks Tocqueville.”

Percaya atau tidak, seperti dikatakan pada bagian awal dari tulisan ini, terjemahan buku kedua karya Tocqueville di bawah judul *Jiu Zhidu yu Da Geming* (Orde Lama dan Revolusi Besar) itu tiba-tiba saja populer. Tak kurang dari Presiden/Sekjen Partai Komunis China, Xi Jinping, menganjurkan para kader membaca buku itu dengan seksama dan membandingkan situasi Perancis pra-Revolusi dengan keadaan sosial politik China pasca-Reformasi. Semua toko buku di kota-kota besar menyediakannya, dan konon buku itu kini menjadi bacaan paling laris di hampir seluruh China.

Menurut sinolog Joseph Fewsmith popularitas buku itu dimulai oleh ilmuwan sosial bernama Hua Sheng, seorang ekonom yang banyak menulis dan bicara pada masa perdebatan mengenai reformasi menjelang peristiwa Tiananmen 1989. Pada suatu hari ia dipanggil untuk menghadap Wang Qishan, kini menjabat sebagai wakil perdana menteri yang bertanggung jawab atas masalah-masalah keuangan, termasuk pemberantasan korupsi. Pada pertemuan itulah Wang menganjurkan agar para intelektual membaca buku karya itu.

Pada mulanya para *blogger* di Internetlah yang berdebat mengenai teori Tocqueville. Salah satu kesimpulan mereka adalah pendapat bahwa reformasi yang dimulai oleh Deng Xiaoping kini telah kehilangan semangat sebagai akibat dari penyelewengan yang dilakukan oleh elite pemerintahan, partai, dan militer. Padahal, menurut si penulis itu, tujuan dari reformasi adalah demi mengekalkan posisi Partai Komunis China sebagai pemegang kekuasaan satu-satunya.

Yang menjadi perhatian utama baik para ilmuwan sosial di Barat maupun di China sendiri adalah apa yang populer dengan sebutan “paradoks Tocqueville” yang disebutkan di atas. Bahwa penggulingan rezim penguasa dan revolusi justru terjadi

ketika golongan penguasa sedang bebenah diri atau yang kini populer dengan istilah “reformasi”. Banyak dari para sarjana itu memandang China pada masa kini sedang menghadapi paradoks Tocqueville itu. Pemerintah tengah bebenah, kehidupan rakyat makin meningkat, namun sebaliknya ketakpuasan publik juga makin meninggi.

Ketakpuasan rakyat digambarkan dengan meruyaknya berbagai gejolak masyarakat seperti protes damai dan yang dengan kerusuhan, demo, konflik dengan kekerasan antara aparat polisi dan para pemorotes. Statistik yang antara lain dikeluarkan oleh Chinese Academy of Social Sciences mencatat pada 1993 “hanya” ada 8.700 demo dan 10 tahun kemudian angka itu meningkat menjadi 58.000 atau tumbuh sebanyak 700%. Jumlah kerusuhan itu turun naik setelah 2003 tapi selalu berada di atas 50.000.

Pasal yang menjadi penyebab demonstrasi macam-macam. Mulai dari politik seperti tuntutan agar pemenang Hadiah Nobel Liu Xiaobo yang dipenjarakan dibebaskan, buruh yang menuntut gaji lebih tinggi, protes atas pembebasan lahan untuk dijadikan kawasan komersial, sampai ke protes atas polusi dari pabrik-pabrik, korupsi, dan isu-isu sosial lainnya. Kesimpulannya, perlawanan dari bawah diarahkan pada pelbagai macam “penyakit masyarakat” sebagai akibat dari proses kapitalisasi perekonomian sejak reformasi diperkenalkan.

Sementara pengamat mengatakan, dunia di luar China supaya tak terlalu terpengaruh oleh begitu banyaknya aksi protes itu. Alasannya, pertama walaupun jumlahnya besar, hampir semua gejolak massa itu terjadi di wilayah-wilayah pinggiran. Para penguasa selalu berusaha agar tak terjadi aksi protes besar seukuran Tiananmen 1989 atau gerakan Fa Lun Gong (1999) yang sempat mengegerkan ibu kota. Kedua, pemerintah memang membiarkan kegiatan protes sebagai cara buat menyalurkan frustrasi umum, asalkan protes itu tidak menjadi besar dan tidak terjadi di perkotaan.

Namun, dari semua aksi protes itu ada juga yang bergema di dunia internasional. Itu terjadi di Wukan, sebuah desa dekat kota Guangzhou, di propinsi Guangdong, China Selatan pada bulan September 2011. Konon, para birokrat dan pemimpin partai di desa itu telah merampas tanah-tanah yang dikerjakan petani dan menjualnya kepada para pengembang sehingga protes pun muncul. Polisi bertindak brutal dengan menahan para pemimpin perlawanan itu dan salah satu dari mereka tewas karena disiksa. Akibatnya, aksi perlawanan rakyat sangat dahsyat: aparat polisi, birokrat pemerintahan dan partai terusir dari Wukan. Hanya setelah tarik-menarik selama berminggu-minggu dan setelah akhirnya pemerintah menyerah dan membatalkan jual beli tanah itu kerusuhan itu dapat diredam.

Kembali ke istilah “Tocqueville paradoks”, keadaan masyarakat pra-peruntuhan dinasti Bourbon seperti yang digambarkan oleh penulis itu ada kemiripannya dengan situasi di China menjelang berakhirnya abad ke-19. Dinasti Qing (1844-1611) tetap berdiri tegap walaupun terjadi berbagai pemberontakan besar. Sebut saja misalnya dua yang paling hebat: Pemberontakan Taiping (*Taiping Tianguo*, 1850-1864) atau Pemberontakan Boxer (*Yihetuan*, 1898-1901). Ratusan ribu bahkan mungkin lebih dari satu juta orang menjadi korban dalam kedua kerusuhan bersenjata itu. Krisis yang dihadapi pemerintah Qing terjadi antara lain akibat dari kedua kerusuhan

tersebut, dan hanya setelah intervensi tentara kolonial dikerahkan, kedua gejala sosial itu dapat ditindas.

Sama seperti di Perancis, revolusi terjadi ketika penguasa Qing berusaha melakukan reformasi dengan memberi kebebasan kepada kaum intelektual untuk memikirkan bagaimana cara keluar dari krisis nasional. Dampaknya, sejak 1898 timbullah berbagai wacana dalam masyarakat, terutama di kalangan kaum terpelajar untuk mencari “obat” demi menyelamatkan bangsa dan negara. Ada golongan yang mengkampanyekan “Gerakan untuk belajar dari orang asing (baca: Barat), di bawah slogan *Yangwu Yundong*. Ada juga kelompok yang mengumandangkan “Kepribadian China sebagai dasar, teknologi Barat untuk hal-hal praktis” Dua tokoh intelektual terkenal Kang Youwei dan Liang Qichao malahan lebih progresif lagi. Mereka memunculkan gagasan untuk tetap mempertahankan pemerintah Qing tapi dengan mempraktekkan monarki konstitusional, meniru sistem yang dilakukan di Inggris.

Masa antara akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 itulah waktu ketika berbagai pemikiran beradu argumentasi tentang bagaimana China keluar dari krisis nasional sebagai akibat dari penjajahan oleh Barat dan Jepang. Masa itu juga yang disebut dalam perbendaharaan pepatah Bahasa Tionghoa disebut sebagai “berbagai bunga berkembang dan berbagai aliran berlaga” (*baihua qifang, baijia zhengming*). Persaingan pemikiran itu tidak hanya lewat perdebatan, tetapi juga melalui polemik dalam surat kabar dan majalah. Periode 1898 sampai menjelang dasawarsa pertama abad ke-20 merupakan masa keemasan penerbitan di China. Pada periode itulah terbit surat kabar dan majalah seperti *Xin Qingnian* (Pemuda Baru) yang memuat pemikiran para pemuda, dan *Minbao* yang menyuarakan nasionalisme. Pada umumnya sebagian besar para pemikir generasi muda pada waktu itu sampai pada kesimpulan bahwa penyebab utama krisis nasional adalah Ajaran Kong Hu Cu yang selama berabad-abad telah mengungkung bangsa China. Pemikiran itulah yang menjadi penyebab timbulnya Gerakan 4 Mei 1919.

Di tengah perdebatan yang sedang hangat-hangatnya itulah Sun Yat-sen (Sun Zhongshan), seorang dokter, memunculkan pemikiran tentang kesadaran etno nasionalis yang mengatakan bahwa mayoritas bangsa China adalah bangsa Han, dan bahwa dinasti Qing yang dikuasai orang Manchu, yang berarti non-Han. Karena itu pemerintahan dinasti Qing adalah penjajahan oleh orang asing dan harus digulingkan dengan revolusi, Sebagai gantinya harus didirikan republik demokratis yang didasarkan pada San Min Zhuyi (Nasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan Sosial), harus dibentuk.

Seruan Sun Yat-sen itulah yang mematangkan suasana, walaupun dengan proses yang berliku-liku membawa China ke Revolusi 1911 atau *Xinhai Geming*. Kesimpulannya, revolusi pecah pada saat rezim penguasa tengah berusaha untuk mencari jalan perbaikan demi keluar dari krisis. Suasana China sekarang ada miripnya dengan keadaan menjelang Revolusi 1911, khususnya keadaan ketika pemerintah sedang melakukan reformasi di tengah hiruk-pikuk berbagai protes. Suasana antara akhir abad ke-19 sampai menjelang pecahnya Revolusi Xinhai dapat dikatakan sejalan dengan “paradoks Tocqueville.”

Dalam suasana seperti sekarang ini, apakah pemerintah China dan dominasi Partai Komunis China (PKC) terancam? Pertanyaan ini merupakan bahan perdebatan yang tak akan habis-habisnya. Sudah sejak pertengahan dasawarsa 1980an muncul berbagai prediksi bahwa akhir dari pemerintah sudah dekat. Perkiraan yang paling terkenal adalah terbitnya buku Gordon Chang, di bawah judul *The Coming Collapse of China*. Karya Chang ini antara lain mengatakan, China akan kolaps sebagai akibat dari berbagai krisis seperti defisit anggaran belanja, justru keanggotannya dalam WTO, dan keengganan sebagian dari aparat pemerintahnya yang sebenarnya tak menginginkan reformasi.

Chang juga mengatakan, PKC sudah kehilangan kekuatan untuk tetap berkuasa sebagai akibat dari reformasi itu sendiri karena identitasnya sebagai partai yang menjunjung sosialisme/komunisme telah lenyap. Disebutkan juga tentang berbagai perlawanan yang dilakukan Falungong, kaum minoritas, dan rakyat Taiwan. Masa kolaps yang diprediksi Chang adalah tahun 2006. Seterusnya dalam edisi baru dari buku tersebut ia mengeluarkan perkiraan baru, yakni 2011. Krisis yang menghinggapi Cina seperti yang disebutkan Chang memang fakta yang tak dapat dibantah. Namun, sampai sekarang RRC dan PKC masih berdiri dengan tegak.

Topik baru yang diperkirakan akan membuat Cina kolaps adalah pertumbuhan ekonomi yang akan turun sampai angka 7%, korupsi di kalangan elite, produksi yang tetap tinggi, namun permintaan merosot, dan apa yang disebut sebagai *housing bubble*. Dikatakan dalam ancaman yang disebut terakhir itu, para pengembang sibuk membangun perumahan dan apartemen, namun ketakmampuan konsumen untuk membeli tempat untuk berteduh telah menyebabkan bangunan yang dibuat itu tak berpenghuni. Masih harus ditunggu apakah housing bubble ini dan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi lainnya akan membuat ekonomi China akan kolaps.

Akan tetapi, yang menarik untuk diamati adalah bagaimana para pemimpin China sekarang bereaksi atas teori Tocqueville dan ancaman kemungkinan meletusnya revolusi atau kerusuhan besar itu. Mungkin yang patut juga menjadi perhatian popularitas buku *Jiu Zidu yu Da Geming* itu tidak datang dari bawah, tapi justru dimulai dari kalangan para pemimpin sendiri. Kalau saja buku itu muncul pada masa Mao Zedong, pasti peredarannya akan dilarang dan penerbitnya akan dimasukkan ke dalam kam kerja paksa. Yang dilakukan para pemimpin justru sebaliknya. Wang Qishan, seperti yang disebutkan di atas menganjurkan, lewat Hua Sheng, yang seorang sejarawan, agar publik membaca buku tersebut. Popularitas buku itu menanjak bukan karena peredarannya dilakukan dengan diam-diam. Ini merupakan suatu kemajuan besar apabila diingat pemerintah China di masa lalu selalu sangat terobsesi dengan “rahasia negara”.

Yang juga menarik untuk dicermati adalah langkah-langkah pemerintah China untuk mengantisipasi ancaman itu. Xi Jinping dan Wang Qishan, menganjurkan agar buku itu dibaca khalayak. Rekomendasi Xi dan Wang itu juga dimuat oleh media resmi, yang tentu saja menambah popularitas *Jiu Zhidu yu da Geming* itu. Rekomendasi kedua pemimpin itu, kata sementara pemikir politik China sendiri, mencerminkan hadirnya apa yang disebut sebagai *sense of crisis* di kalangan para pemimpin China. Sebab, buku itu tidak memberikan solusi buat keluar dari situasi yang mengandung ancaman. Bahkan, itu mungkin semacam undangan kepada publik—terutama kaum

intelektual untuk memberikan saran kepada pemerintah buat berpartisipasi dalam mencari jalan keluar dari krisis.

Langkah-langkah yang rencananya akan diambil pemerintah China juga juga mengacu ke kehadiran paradoks Tocqueville itu. Pemerintah nampaknya akan serius menangani korupsi, ancaman yang paling menonjol sekarang ini. Perdana Menteri Li Keqiang misalnya mengumandangkan tentang bagaimana mengatasi angka urbanisasi yang terlalu tinggi, karena faktor itulah yang menimbulkan adanya jurang kemiskinan dan kekayaan di wilayah kota. Xi banyak sekali berbicara tentang bahayanya korupsi yang mengancam segala sendi kehidupan. Perdana Menteri Li juga menyuarakan kemungkinan pengurangan campur tangan pemerintah dalam aktifitas ekonomi lantaran itulah yang menyebabkan adanya persekutuan hitam antara birokrasi dengan kalangan bisnis.

Bagaimana dengan di Indonesia? Berbagai persoalan yang tengah dihadapi para pengelola negara di negeri ini seperti tak terlalu jauh berbeda dengan ancaman krisis yang tengah dihadapi para penguasa di China. Artinya paradoks Tocqueville juga mungkin juga sedang melanda Indonesia. Sayangnya berita tentang popularitas buku Tocqueville di China sama sekali tak bergema di sini. Bahkan mungkin, tak banyak yang tahu atau walaupun tahu bahkan tak peduli dengan perkembangan di sana selama beberapa bulan terakhir ini.

Bagaimana dengan di Indonesia? Berbagai persoalan yang tengah dihadapi para pengelola negara di negeri ini seperti tak terlalu jauh berbeda dengan ancaman krisis yang tengah dihadapi para penguasa di China. Artinya paradoks Tocqueville mungkin juga sedang melanda Indonesia. Sayangnya berita tentang popularitas buku Tocqueville di China sama sekali tak bergema di sini. Bahkan mungkin, tak banyak yang tahu atau walaupun tahu bahkan tak peduli dengan perkembangan di China selama beberapa bulan terakhir ini.

**Penulis adalah peneliti pada
Lembaga Kerjasama Indonesia-China (LIC);
Dan Guru Besar Chinese Studies, Universitas BUNUS.**